



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara Telp : 021. 88955882

Website: www.ubharajaya.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: SKET/129/II/2023/FEB-UBJ

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M.
NIP : 1802324
Jabatan : Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menerangkan bahwa nama :

Nama : Dr. David Pangaribuan, S.E., M.Si
NIDN : 0425076803
Jabatan : Dosen Tetap Prodi Akuntansi

Adalah benar sebagai Narasumber dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "**Pentingnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**" yang diadakan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Betesda Johar Baru – Jakarta Pusat, pada tanggal 19 November 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Januari 2023

A.n. DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
WADEK II



Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M.

NIP : 1802324

Tembusan:
- Arsip

Jakarta, 25 Oktober 2022

Kepada Yth
Bapak Dr. David Pangaribuan, SE, M.Si
Di
Tempat

Hal: Kesediaan Menjadi Nara Sumber

Dengan hormat

Dalam rangka pembekalan Diaken dan Penatua Terpilih masa Bhakti 2022-2027 perlu diberikan pemahaman dan pembekalan tentang pentingnya Akuntabilitas kinerja organisasi non Profit.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami dari Panitia pemilihan Calon Diaken dan Penatua Jemaat GPIB Betesda Johar Baru Jakarta Pusat meminta kesediaan Bapak menjadi nara sumber dalam kegiatan tersebut. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring/luring pada hari Sabtu 19 November 2022, dengan topik **PENTINGNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI**. Demikian kami sampaikan, atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih

Hormat kami,
Panitia Pemilihan Diaken & Penatua

Hormat kami,
Pengurus Pelkat Gerakan Pemuda



Nancy Setiawan

Ketua III Pengurus Harian

PENTINGNYA AKUNTABILITAS KINERJA PADA ORGANISASI PUBLIK

Dilaksanakan Pada Pembekalan Calon Diaken
dan Penatua GPIB Bethesda
Jakarta, 19 November 2022

Disampaikan Oleh
Dr. David Pangaribuan, SE, M.Si

Agenda

1. Pengertian organisasi Sektor publik
2. Sumber dan penggunaan dana publik
3. Pengurus organisasi publik
4. Pertanggungjawaban organisasi publik
5. Pengertian akuntabilitas publik
6. Pentingnya akuntabilitas publik
7. Tujuan akuntabilitas publik
8. Manfaat akuntabilitas publik
9. Syarat akuntabilitas publik

Pengertian Organisasi Sektor Publik

- Organisasi sektor publik adalah **organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik**. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya.
- Namun sebagai sebuah organisasi, proses manajemen seperti Plan, Do, Check and Monev tetap berjalan seperti pada setiap organisasi umumnya.
- Untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya maka diperlukan akuntabilitas publik sebagai syarat untuk dikatakan organisasi dikelola secara akuntabel

Karakteristik Organisasi Sektor Publik

1. Non Profit Oriented
2. Dimiliki secara bersama
3. Penggunaan dana dikelola secara mandiri
4. Memiliki struktur organisasi hirarkis dan vertikal
5. Memiliki tujuan untuk kesejahteraan bersama atau anggota

Lahirnya Organisasi Sektor Publik

- Istilah organisasi berasal dari bahas Yunani “orga” yang berarti “alat”. Dalam pengertian umum organisasi dapat dipahami sebagai alat atau wadah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama.
- Sektor publik dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.

- Jadi, Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya.
- Contoh sector public adalah bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan transportasi. Oleh karena area sector public sangat luas, maka dalam penyelenggaraanya sering diserahkan ke pasar, namun pemerintah tetap mengawasinya dengan sejumlah regulasi.

Karakteristik Organisasi Sektor Publik

1. Tujuan → mensejahterakan publik
2. Aktivitas → pelayanan hajat hidup orang banyak
3. Sumber pembiayaan → APBN/APBD
4. Pola pertanggung jawaban → DPR/DPRD
5. Kultur organisasi → birokratis formal dan berjenjang
6. Penyusunan Anggaran → tri partiat kelembagaan
7. Stakeholder → Publik dan Bank Dunia

Pengertian Manajemen Publik

- Manajemen publik menurut Overman dalam Keban (2004 : 85) menyebutkan bahwa Manajemen publik bukanlah scientific management, meskipun sangat dipengaruhi scientific management.
- Manajemen publik bukan policy analysis atau administrasi publik, menekankan antara orientasi rational in strumental pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan dipihak lain.
- Public management adalah suatu studi interdisipliner dari aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik dan informasi disisi lain.

- Berdasarkan pendapat Overman tersebut, Hyde dan Shafritz (1991:xi), mengemukakan bahwa "manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih".
- Untuk membedakan keduanya secara jelas maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik mempresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia.
- Dengan kata lain, manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik.

Akuntabilitas Publik

- Sedangkan menurut Mahmudi (2007) yaitu :
“Akuntabilitas publik adalah **kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumberdaya publik kepada pihak pemberi mandat dalam hal ini DPR/DPRD.**”

- Akuntabilitas akan selalu menyatu dengan kegiatan manajemen dan akuntansi. Akuntabilitas publik adalah salah satu akuntabilitas yang dibuat di ruang publik, baik untuk perusahaan atau pemerintah.
- Akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban individu ataupun organisasi untuk menyajikan, mengungkapkan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan berbagai kegiatan dan aktivitas yang dipercayakan kepada entitas tersebut. Salah satunya akuntabilitas keuangan.
- Untuk ruang lingkup perusahaan, akuntabilitas dibuat oleh pimpinan atau mereka yang memiliki kewenangan tertentu. Sedangkan untuk skala pemerintahan, akuntabilitas dibuat oleh eksekutif, baik itu di tingkat daerah ataupun negara.
- Akuntabilitas publik ini dibuat dalam periode khusus. Informasi yang ada di dalamnya disebarluaskan kepada pihak yang memberikan kepercayaan atau pada pihak yang terkena dampak dari diterapkannya kebijakan perusahaan

- Contohnya, ketua RT atau karang taruna ingin menyelenggarakan kegiatan 17 Agustus dengan memberikan hadiah yang sumber dananya berasal dari iuran warga. Dalam akhir kegiatan, panitia harus membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- Di dalamnya harus tercantum pemasukan, pengeluaran, detail sumber alokasi dana, persiapan, sisa dana, sampai proses berjalannya kegiatan tersebut.
- Laporan akuntabilitas tersebut akan ditampilkan pada papan informasi, sehingga semua warga yang ada di RT tersebut bisa mendapatkan informasi dan memantau transparansi penggunaan dana iurannya.
- Sama seperti ruang lingkup organisasi mereka yang diberikan kepercayaan, pada akhir masa jabatannya harus membuat laporan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah dilakukan.

Fungsi Akuntabilitas Publik

1. Sebagai Alat Kontrol Berjalanya Demokrasi

- Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi, dalam proses pelaksanaannya, semua rakyat memiliki hak yang sama mencalonkan diri menjadi pejabat eksekutif atau legislatif.
- Selanjutnya, calon tersebut akan dipilih oleh rakyat dan akan bekerja dengan cara menetapkan kebijakan sesuai dengan kepentingan rakyat. Namun harus bisa mempertanggungjawabkan semua kebijakannya kepada rakyat.
- Asas demokrasi bisa juga ditemukan organisasi, pemimpin atau ketua akan mempertanggungjawabkan berbagai program kerjanya pada anggota. Akuntabilitas publik sangat penting dan sangat prinsipil sebagai media kontrol bagi pemegang kepercayaan, masyarakat kepada pemimpinnya melalui akuntabilitas yang sudah dibuat.
- Akuntabilitas juga dijadikan indikator untuk menentukan keberhasilan kepemimpinan yang sudah dilakukan dalam periode waktu tertentu. Dewan pengawas atau berbagai pihak yang berkepentingan bisa melakukan evaluasi atas performa yang sudah dilakukan

2. Meminimalisir Risiko Penyalahgunaan Wewenang/Tindakan Korupsi

- Robert Klitgaard “Kewenangan dan kekuasaan cenderung mengarah pada tindakan korupsi karena dorongan dalam dirinya sendiri untuk memperoleh kekayaan secara instan juga adanya cacat sistem yang bisa dimanfaatkan olehnya.
- Tindakan korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan, tapi juga dalam ruang lingkup bisnis atau organisasi.
- Karena sulitnya mengendalikan diri untuk tidak melakukan korupsi, maka pencegahan yang realistis pun dilakukan dengan cara membuat sistem yang jelas, dan juga wajib membuat akuntabilitas untuk pihak yang memiliki wewenang.
- Sebagian besar terungkapnya kegiatan korupsi setelah dilakukan audit keuangan. BPK bisa melakukan analisa dan kontrol terkait ada atau tidaknya tindakan korupsi melalui audit LKP.
- Tanpa akuntabilitas publik, deteksi kegiatan korupsi menjadi sangat sulit. Pihak yang memiliki wewenang bisa merasa bebas karena dirinya merasa tidak diawasi dan tidak harus melakukan pertanggungjawaban.
- Kehadiran akuntabilitas publik tidak hanya bersifat represif, tapi juga preventif. Setiap pemilik wewenang akan berpikir ulang melakukan korupsi, karena dirinya harus membuat akuntabilitas publik yang transparan

3. Meningkatkan Efisiensi Dan Efektifitas

- Suatu proses yang dilakukan secara efisien akan memberikan banyak keuntungan. Contohnya, semakin cepat proses yang dilakukan untuk membuat 1000 unit produk, maka akan semakin banyak keuntungan yang bisa didapatkan.
- Suatu sistem yang efisien tidak bisa diciptakan secara instan, diperlukan proses yang bertahap dan evaluasi secara berkelanjutan. Inilah peran penting dari akuntabilitas publik.
- Kehadiran akuntabilitas bisa dimanfaatkan oleh pemilik kepentingan untuk mengetahui bagian mana saja yang belum bergerak secara efisien, masalahnya, dan bagaimana fokus dalam memecahkan masalah yang harus dicari.
- Tanpa mengetahui bagian yang belum efisien, maka pengembangan dan perbaikan sistem akan sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk dilakukan.
- Seiring berjalannya waktu, pihak pemerintah pun terus berusaha untuk mengefisiensikan pelayanan pada masyarakat. Berbagai terobosan dan inovasi dilakukan oleh perusahaan agar bisa melayani masyarakat dengan waktu yang cepat.
- Selain efisiensi, akuntabilitas pun bisa menciptakan efektivitas.
- Perusahaan yang mampu memberikan performa yang baik pada para stakeholder, melalui berbagai proses secara efektif
- Selain itu, perusahaan juga harus mengetahui kebutuhan dari setiap stakeholdernya, sehingga bisa mengambil kebijakan yang mampu mencakup berbagai kepentingan.
- Proses akuntabilitas publik sangat penting untuk memahami kedudukan dan kebutuhan dari stakeholder yang berhubungan dengan perusahaan.

Pengertian Akuntabilitas

- Akuntabilitas berasal dari bahasa asing yakni “*accountability*” yang berarti pertanggungjawaban. Akuntabilitas memiliki makna keadaan untuk dipertanggungjawabkan ataupun keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.
- Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari badan hukum atau pimpinan suatu organisasi, kepada pihak yang berwenang menerima keterangan atau pertanggungjawaban tersebut

- Menurut **Miriam Budiardjo**, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat.
- Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan kepada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi yang saling mengawasi.
- Menurut **Mohammad Mahsun**, akuntabilitas memiliki definisi secara luas dan secara sempit. Secara luas, akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, kepada pihak pemberi pertanggungjawaban tersebut.
- Secara sempit, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa dan untuk apa organisasi bertanggung jawab.
- Menurut **Sedarmayanti**, akuntabilitas bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
- Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu atau kelompok dalam suatu institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yakni menjamin terwujudnya nilai-nilai publik

Perbedaan Akuntabilitas dengan Responsibility

- Dalam bahasa Inggris, *responsibility* berarti tanggung jawab. Lalu, mengapa pertanggungjawaban ini disebut sebagai akuntabilitas bukan *responsibility*?
- Hal tersebut karena akuntabilitas artinya adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.
- Sementara *responsibility* atau *responsibilitas* adalah kewajiban untuk bertanggung jawab.

Aspek-Aspek Akuntabilitas

- Dalam prinsip akuntabilitas ada lima aspek penting
 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan
 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan
 4. Akuntabilitas membutuhkan konsekuensi
 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja.

Penjelasan masing-masing akuntabilitas:

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok dalam institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan akan bertanggung jawab memberikan arahan, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di sisi lain, individu atau kelompok dalam institusi ini akan bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Dalam prinsip akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak

2. *Accountability is results oriented*

- Dalam aspek ini, keberadaan prinsip akuntabilitas mengharapkan hasil dengan berupa perilaku aparat yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif.
- Setiap individu/kelompok dalam institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta berupaya untuk memberikan kontribusi yang maksimal

3. *Accountability requires reporting*

- Laporan yang dimaksud adalah laporan kinerja sebagai perwujudan dari prinsip akuntabilitas.
- Adanya laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan tindakan dan hasil yang telah dicapai dalam suatu institusi, serta mampu memberikan bukti nyata mengenai hasil yang telah dilakukannya.
- Dalam birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu akan berwujud laporan berdasarkan kontrak kerja, sementara dalam institusi wujud laporannya disebut dengan LAKIP

4. *Accountability is meaningless without consequences*

- Akuntabilitas merupakan kewajiban. Dalam sebuah kewajiban akan menunjukkan adanya tanggung jawab, dan tanggung jawab tersebut menghasilkan sebuah konsekuensi.
- Adanya konsekuensi tersebut dapat berupa dua hal yakni penghargaan atau sanksi kepada individu atau kelompok dalam institusi dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

5. *Accountability improves performance*

- Dalam aspek ini, tujuan utama akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja individu atau kelompok dalam suatu instansi.
- Akuntabilitas memiliki pendekatan yang bersifat proaktif (*proactive accountability*), sehingga akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan.
- Dalam prosesnya, setiap individu atau kelompok dalam suatu institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi, guna meningkatkan kinerjanya

Mengapa Akuntabilitas Penting?

- Terdapat beberapa alasan mengapa akuntabilitas bermanfaat dan menjadi hal penting dalam proses kinerja individu atau kelompok dalam suatu institusi, yakni:
- Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi)
- Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang (peran konstitusional)
- Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar)

Tingkatan dalam Akuntabilitas



Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yakni adanya akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder.

1. Akuntabilitas Personal (*Personal Accountability*)

- Mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, misalnya kejujuran, integritas, moral, hingga etika. Pribadi yang memiliki prinsip akuntabilitas adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah.

2. Akuntabilitas Individu

- Mengacu pada hubungan antara individu (yang diberikan tanggung jawab) dengan lingkungan kerjanya. Misalnya, hubungan antara PNS dengan instansi pemberi kewenangan. Bertanggung jawab memberikan arahan, bimbingan, dan sumber daya yang memadai, serta menghilangkan hambatan kerja; sementara PNS selaku individu yang diberi tanggung jawab harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

3. Akuntabilitas Kelompok

- Dilaksanakan atas dasar kerjasama kelompok, akuntabilitas tingkat ini, pembagian kewenangan dan semangat kerjasama antara berbagai kelompok lain dalam institusi tersebut, memainkan peranan yang penting guna mencapai kinerja organisasi yang diharapkan.

4. Akuntabilitas Organisasi

- Dalam tingkatan akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah dicapai, baik laporan yang dilakukan oleh individu maupun kinerja organisasi kepada masyarakat umum lainnya.

5. Akuntabilitas *Stakeholder*

- Stakeholder adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, dalam tingkatan akuntabilitas stakeholder ini adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, serta bermartabat

Dimensi Akuntabilitas

- Prinsip akuntabilitas, harus memuat beberapa dimensi berikut ini:
1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for probity and legality*)
 - Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang telah diterapkan sebelumnya.
 2. Akuntabilitas proses (*Process accountability*)
 - Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sudah cukup baik, termasuk dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, hingga prosedur administrasi.
 - Hal tersebut mengacu pada prinsip akuntabilitas yang banyak digunakan oleh organisasi sektor umum, sehingga dimensi ini dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah.
 - Setelah itu ada pula pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas supaya menghindari terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 3. Akuntabilitas program (*program accountability*)
 - Dalam dimensi akuntabilitas ini, memberikan pertimbangan mengenai tujuan yang ditetapkan apakah dapat tercapai atau tidak; serta apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal atau tidak.
 4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)
 - Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil kepada masyarakat luas.

Mekanisme Akuntabilitas di Indonesia

- Proses akuntabilitas tidak dapat terwujud tanpa adanya alat akuntabilitas. Di negara Indonesia, alat akuntabilitas ada beberapa, yakni:
- Strategic Plans berupa RPJP, RPJM, RKP, dan lain-lain.
- Kontrak kinerja berisi kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung.
- Laporan kinerja berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, dengan pengukuran dan analisis pencapaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan.

Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas sendiri yang berbeda dengan organisasi lain. Contoh mekanisme akuntabilitas dalam sebuah organisasi atau institusi adalah: sistem penilaian kerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, sistem pengawasan (dengan adanya CCTV, fingerprints, atau software yang berguna mengawasi kinerja pegawai)

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang mengandalkan prinsip akuntabilitas, beberapa aspek harus diperhatikan yakni:

1. kepemimpinan
2. transparansi
3. integritas
4. tanggung jawab
5. keadilan
6. kepercayaan
7. keseimbangan
8. kejelasan
9. konsistensi

Akuntabilitas Dalam Sektor Publik

- Selama masa Pandemi Covid-19 Pemerintah mengambil kebijakan untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Namun terdapat kasus penyelewengan dana bantuan sosial oleh pejabat publik menimbulkan akuntabilitas penggunaan dana menanggulangi pandemi (Shahib et al., 2022)
- Akuntabilitas penting untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan yang responsive, partisipatif, dan profesional dalam melaksanakan fungsinya (Khotami, 2017).
- Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas mendorong berbagai negara melakukan reformasi pemerintahannya agar lebih efisien dan efektif dalam pelayanan kepada masyarakat

- Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas terkait penyajian, pelaporan kegiatan kepada prinsipal.
- Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan. Nilai dan prinsip tata kelola yang baik tercermin dari hubungan antara otoritas publik dalam menyediakan pelayanan public (Aziz et al., 2015)
- Akuntabilitas internal mengacu pada akuntabilitas yang berlaku dalam sistem organisasi tertentu dan melibatkan pelaporan langsung dari bawahan kepada atasan yang memegang kekuasaan. Sedangkan akuntabilitas eksternal mengacu pada akuntabilitas tidak langsung yang melibatkan pelaporan kepada pihak di luar organisasi.

Referensi

- Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study.
- Khotami, M. (2017). *The Concept Of Accountability In Good Governance*.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Penerbit Andi.
- Shahib, H. M., Hasanuddin, M. R., Nurdin, Y., Palete, S., Mika, F., & Rahayu Saputri, R. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia.

(25.467 belum dibaca) - david_sti x Gereja Protestan di Indonesia ba x suster.ubharajaya.ac.id

google.com/maps/place/Gereja+Protestan+di+Indonesia+bagian+Barat+(GPIB)+Bethesda/@-6.1849425,106.8531191,17z/data=!3m1!1e3!1s0x2e69f4507613...

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Bethesda

5.0 ★★★★★ 22 ulasan
Gereja
Tutup sementara

Rute Simpan Di Sekitar Kirim ke ponsel Anda Bagikan

Jl. Kramat Jaya Baru I No.16, RT.2/RW.4, Johar Baru, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560

Terletak di: Pasar Johar

Tutup sementara

Restoran Hotel Tempat menarik Transportasi Umum Parkir Apotek ATM

SMK Negeri 31 Jakarta Indomaret Kramat Jaya Baru 247 / TUYS Minimarket Masakan Manado 88 Apotek K 24 MS Glow Johar Jakarta Pusat Toko Kosmetik MTS Negeri 9 Jakarta Masjid Al Ikhlas

Jl. Kramat Jaya Baru I Alfamart Kramat Jaya Minimarket Langkah by Lina Lee Pusat Perbelanjaan Hotel / Wisma Mirabel Hotel letana Ratu 4.0 ★ (215) Hotel bintang 2 Masjid Al Jihad Sentong AHASS RAJAWALI II Bengkel Sepeda Motor TPU Kawi Kawi-Johar Baru MerRa Green Co Living Residence

Jl. Pelita VII Gg. Pelita 3 DPS Jl. DPS Gg. Kopro I Gg. Kopro II Wisma Trisakti GM SMP Negeri 76 Jakarta Badan Pengawas Obat dan Makanan...

GOR Johar Baru MESS XLI gang TT Music studio Embryonic Paradoks Coffe House Kedai Kopi

Jl. Kramat Jaya Baru I Jl. Kramat Jaya Baru I Jl. Kramat Jaya Baru I Jl. Kramat Jaya Baru I

10:44 PM 3/1/2022